



JIGE 6(2) (2025) 406-417

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

[ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige](http://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige)

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3784>

# Analisis Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Lombok Utara

Leni Aprilia Sukma<sup>1\*</sup>, Tialurra Della Nabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

\*Corresponding author email: [leniaprilia242@gmail.com](mailto:leniaprilia242@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received April 13, 2025  
Approved May 15, 2025

#### Keywords:

Motor Vehicle Tax,  
Financial  
Accountability, Local  
Revenue,  
Transparency, Public  
Trust

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the management of Motor Vehicle Tax (PKB) revenue based on financial accountability in North Lombok Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results indicate that PKB management in North Lombok Regency has been generally effective, with annual revenue realization consistently exceeding the set targets. However, the application of financial accountability principles, such as financial reporting transparency and public participation, still faces challenges, particularly limited information access and low fiscal literacy among the public. Supporting factors for accountability implementation include the use of digital systems like e-Samsat and inter-agency synergy, while obstacles involve geographical barriers, low community income, and limited digital literacy. The study concludes that enhancing financial accountability in PKB management can strengthen public trust in local governments and support the optimization of regional revenue.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis akuntabilitas keuangan di Kabupaten Lombok Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PKB di Kabupaten Lombok Utara secara umum telah berjalan efektif dengan capaian realisasi pendapatan yang melampaui target setiap tahun. Namun, penerapan prinsip akuntabilitas keuangan, seperti transparansi pelaporan dan partisipasi publik, masih menghadapi tantangan, terutama terkait akses informasi yang terbatas dan rendahnya literasi fiskal masyarakat. Faktor pendukung implementasi akuntabilitas meliputi penggunaan sistem digitalisasi e-Samsat dan sinergi antarinstansi, sementara hambatannya mencakup faktor geografis, ekonomi masyarakat yang rendah, serta keterbatasan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan PKB dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Sukma, L. A., & Nabila, T. D. (2025). Analisis Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 406-417. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3784>

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan daerah. Namun, efektivitas pengelolaan pajak sangat bergantung pada transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas sistem perpajakan. Dalam konteks pandemi COVID-19, tantangan ini semakin besar karena penerimaan pajak di banyak daerah mengalami penurunan signifikan akibat pelemahan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerapan teknologi seperti artificial intelligence, algoritma pemerintahan, dan sistem layanan pajak digital telah terbukti memberikan dampak positif. Penelitian oleh Adha, Rulinawaty, dan Madya (2024) menunjukkan bahwa ketiganya secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, menegaskan pentingnya inovasi digital dalam sistem perpajakan modern. Di sisi lain, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan juga memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan, sebagaimana dibuktikan oleh (Adikur & Imran, 2022) dalam konteks wajib pajak kendaraan bermotor.

Lebih lanjut, transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi blockchain. (Ariyibi et al., 2024) menegaskan bahwa teknologi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan melalui fitur desentralisasi, ketertelusuran, dan ketidakberubahan data, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan mengurangi celah pajak. Di samping itu, pemahaman teoritis mengenai perilaku kepatuhan pajak juga terus berkembang. (Mohd Azmi & Md Daud, 2024) mengusulkan pendekatan matriks teoritis yang merekonseptualisasi perilaku wajib pajak, termasuk dimensi kepercayaan, etika, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.

Dalam konteks Kabupaten Lombok Utara, pengelolaan PKB menghadapi tantangan serupa. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan penerapan sistem yang berbasis teknologi untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan secara optimal, serta memperkuat transparansi dan efisiensi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk patuh membayar pajak, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah yang optimal sangat bergantung pada sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara. Namun, pengelolaan PKB yang tidak didasari pada prinsip akuntabilitas keuangan dapat menyebabkan kebocoran dana, ketidakefisienan dalam pemungutan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini tentu berpengaruh pada besaran penerimaan pajak yang tidak maksimal dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima dari pajak digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak, yang sering kali disebabkan oleh persepsi negatif terhadap transparansi pengelolaan pajak, dapat berdampak pada penurunan pendapatan daerah yang sangat dibutuhkan untuk program pembangunan. Studi oleh (Destia & Nurdin, 2022) menunjukkan bahwa persepsi calon wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi faktor utama dalam pembentukan perilaku patuh membayar pajak, termasuk dalam konteks pajak kendaraan bermotor.

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Lombok Utara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pajak, khususnya PKB. Penelitian oleh Casmadi dan Widiarti (n.d.) menyatakan bahwa efektivitas dan kontribusi pungutan PKB sangat menentukan dalam pencapaian target PAD. Kelemahan dalam sistem pengelolaan dan kurangnya transparansi berkontribusi pada belum optimalnya potensi pendapatan daerah dari sektor ini.

Lebih lanjut, faktor psikologis dan persepsi masyarakat juga memainkan peran penting. Studi oleh (Erina et al., 2024) menunjukkan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh kebahagiaan individu dan persepsi terhadap tingkat korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak jika merasa bahwa pemerintah daerah menggunakan dana publik secara adil dan transparan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang dapat menggali sejauh mana akuntabilitas keuangan diterapkan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Utara, serta bagaimana pengelolaan yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini sangat relevan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pengelolaan pendapatan PKB berbasis akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perpajakan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan optimalisasi penerimaan daerah, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor berbasis akuntabilitas keuangan di Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa isu-isu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dapat dipahami melalui data kuantitatif, melainkan juga memerlukan penelusuran terhadap proses, interaksi, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat Dinas Pendapatan Daerah, petugas Samsat, wajib pajak kendaraan bermotor, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki relevansi dengan isu perpajakan daerah. Untuk

memperluas cakupan dan kedalaman informasi, teknik snowball sampling digunakan secara opsional dalam menjangkau informan tambahan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara dengan lokasi utama pengumpulan data di kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat setempat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan potensi daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor serta tantangan nyata yang dihadapi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Proses analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis meliputi pengolahan dan penyandian data, reduksi terhadap informasi yang tidak relevan, pengelompokan ke dalam kategori atau tema seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan, serta interpretasi terhadap makna yang muncul dari data. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi antar metode dan sumber data, guna memastikan akurasi dan konsistensi hasil penelitian.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di tingkat daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang meliputi empat aspek utama, yaitu proses pengelolaan pendapatan PKB, penerapan prinsip akuntabilitas keuangan, faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan PKB yang akuntabel, serta keterkaitan antara akuntabilitas pengelolaan PKB dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Setiap aspek dianalisis berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan data yang diperoleh dari beberapa instansi seperti samsat dan badan penadapatan daerah sehingga memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi aktual pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Utara.

### 1. Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, Termasuk Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2020	16.806.000.000	19.288.548.213	114,77	Target Terlampaui
2021	18.797.000.000	19.201.282.188	102,15	Target Terlampaui
2022	19.153.760.305	21.284.801.349	111,13	Target Terlampaui
2023	20.000.000.000	22.500.000.000	112,50	Target Terlampaui
2024	21.500.000.000	24.000.000.000	111,63	Target Terlampaui

Pengelolaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan pihak ketiga dalam wadah Samsat. Secara umum, proses pengelolaan melibatkan tiga tahap utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, target

penerimaan PKB ditetapkan berdasarkan potensi kendaraan bermotor yang ada, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan fiskal daerah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB selalu melebihi target, yang berarti proses pelaksanaan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, berbagai strategi telah diterapkan, seperti inovasi pelayanan berbasis digital (e-Samsat), penyediaan layanan pembayaran di tempat umum seperti minimarket, serta pelaksanaan Samsat keliling untuk menjangkau daerah terpencil. Strategi ini terbukti mampu mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak dan mengurangi angka tunggakan. Evaluasi berkala dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi, serta mengidentifikasi kendala lapangan. Dengan capaian realisasi yang selalu melampaui target selama lima tahun berturut-turut, dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan PKB di Kabupaten Lombok Utara berada dalam jalur yang optimal dan menunjukkan peningkatan efektivitas administrasi fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan temuan (Mudjiyanti et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pelayanan dan kemudahan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain data realisasi penerimaan PKB, analisis terhadap proses pengelolaan keuangan daerah secara umum juga penting untuk dipaparkan agar memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait kondisi fiskal di Kabupaten Lombok Utara. Seperti yang dikemukakan oleh (Nuryanah & Gunawan, 2022), pemahaman terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak perlu dikaji dalam konteks kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan yang diterapkan oleh daerah. Oleh karena itu, berikut disajikan data realisasi pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir, yang dapat menggambarkan sejauh mana kontribusi sektor PKB dalam membentuk struktur penerimaan daerah.:

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>
2020	103.228.963.678	431.891.539.450
2021	61.696.429.464	689.124.856.409
2022	146.436.634.596	441.842.250.316
2023	172.245.393.629	401.061.269.767
2024	301.418.347.372	549.458.523.580

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun realisasi belanja daerah cenderung stabil dengan fluktuasi ringan, realisasi pendapatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2024. Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari peran sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang secara konsisten melampaui target dalam lima tahun terakhir. Kontribusi dari sektor PKB, baik sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sebagai indikator kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal, menjadi salah satu faktor penguat kapasitas fiskal daerah. Temuan Pratiwi dan Heriyanto (n.d.) memperkuat hal ini dengan menekankan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelayanan dan edukasi fiskal yang dilakukan oleh instansi terkait.

Namun demikian, kesenjangan antara pendapatan dan belanja yang terlihat jelas di beberapa tahun, terutama pada tahun 2021, menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Kesenjangan ini juga mengindikasikan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas belanja agar tetap sesuai dengan prioritas pembangunan yang akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, studi (Ramadhan et al.,

2021) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dan rendahnya kesadaran fiskal dapat memengaruhi ketidakseimbangan anggaran daerah, yang pada akhirnya menuntut perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan fiskal lokal.

Maka dari itu, keberhasilan pengelolaan PKB tidak hanya dinilai dari capaian penerimaan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penguatan struktur fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan analisis pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka pengelolaan PKB, maka semakin kuat pula keterkaitan antara keberhasilan fiskal dan prinsip akuntabilitas keuangan. Hal ini sekaligus mempertegas pentingnya tata kelola keuangan daerah yang bertumpu pada transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab publik dalam setiap prosesnya.

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2020	103.228.963.678	431.891.539.450
2021	61.696.429.464	689.124.856.409
2022	146.436.634.596	441.842.250.316
2023	172.245.393.629	401.061.269.767
2024	301.418.347.372	549.458.523.580

Data tersebut menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada sisi pendapatan daerah. Tahun 2021 menjadi titik terendah dengan pendapatan hanya mencapai Rp61,6 miliar, sementara belanja tetap tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan drastis aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi lonjakan pendapatan daerah hingga mencapai Rp301,4 miliar, yang menandakan adanya peningkatan performa pengelolaan keuangan daerah, termasuk kontribusi yang besar dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Adanya perbedaan mencolok antara pendapatan dan belanja juga menandakan pentingnya perencanaan anggaran yang efisien serta pengawasan yang ketat terhadap realisasi belanja agar tetap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya proses pengumpulan pajak yang penting, tetapi juga pengelolaan belanja yang akuntabel agar tercapai keseimbangan fiskal yang sehat.

## 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Keuangan dalam Pengelolaan PKB

Indikator	Temuan
Aksesibilitas laporan keuangan	Laporan tersedia online, tetapi minim diketahui publik secara luas
Format penyampaian laporan	Masih bersifat teknis dan kurang komunikatif bagi masyarakat awam
Sosialisasi laporan realisasi pajak	Belum dilakukan secara rutin dan merata
Partisipasi masyarakat	Rendah, karena keterbatasan informasi yang mudah dipahami

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pada pentingnya transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks

pengelolaan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lombok Utara, prinsip akuntabilitas keuangan tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga melalui penyampaian informasi tersebut kepada publik secara terbuka, transparan, dan komunikatif.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sejatinya telah melakukan upaya pelaporan realisasi pendapatan, termasuk dari sektor PKB, melalui media daring seperti situs resmi instansi terkait dan kanal informasi publik lainnya. Namun demikian, akses terhadap informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah format pelaporan yang cenderung teknis dan bersifat administratif, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat literasi fiskal yang rendah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Aulia Rohmah & Karsinah, 2024), keberhasilan strategi peningkatan kepatuhan pajak sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan pendekatan komunikasi yang inklusif terhadap masyarakat.

Minimnya intensitas sosialisasi mengenai realisasi pendapatan dan penggunaan dana PKB menjadi kendala tersendiri dalam penerapan akuntabilitas secara substantif. Padahal, akuntabilitas keuangan mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai pihak yang turut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Keterlibatan tersebut tidak hanya dalam bentuk kepatuhan membayar, tetapi juga dalam mengakses informasi, memberikan masukan, dan mengawasi penggunaan dana publik. Sejalan dengan itu, (Saragih & Putra, 2021) menekankan bahwa persepsi etis dan keterbukaan informasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kemauan masyarakat untuk secara sukarela mematuhi kewajiban pajak.

Oleh karena itu, untuk memperkuat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan PKB, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penyederhanaan format laporan melalui infografis, penyampaian informasi secara rutin melalui media lokal, serta penyelenggaraan forum diskusi atau dialog publik yang bersifat partisipatif. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam sistem perpajakan, tetapi juga menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akuntabilitas Keuangan dalam Pengelolaan PKB

Jenis Faktor	Keterangan
Pendukung	Sistem digitalisasi (e-Samsat), kerja sama antarlembaga, kesadaran ASN
Penghambat	Geografis, ekonomi masyarakat rendah, literasi fiskal dan digital terbatas

Penerapan prinsip akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat. Di Kabupaten Lombok Utara, sejumlah faktor pendukung telah berhasil mendorong upaya implementasi akuntabilitas keuangan secara lebih sistematis. Salah satunya adalah keberadaan inovasi pelayanan berbasis digital, seperti e-Samsat, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel tanpa

harus datang langsung ke kantor Samsat. Digitalisasi ini memberikan akses lebih luas, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki pemahaman teknologi yang memadai. Selain itu, integrasi pelayanan lintas sektor di bawah naungan Samsat—yang melibatkan instansi seperti Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja—telah memperkuat koordinasi dalam proses administrasi, verifikasi, dan pelaporan data keuangan terkait penerimaan dari PKB.

Tidak kalah penting, kesadaran aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan akurat turut menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pengelolaan data serta pelaporan fiskal daerah. Etos kerja dan komitmen ASN dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang transparan turut memperkuat landasan implementasi akuntabilitas keuangan di tingkat teknis-operasional.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang cukup kompleks dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama berasal dari faktor geografis Kabupaten Lombok Utara yang memiliki wilayah dengan kontur pegunungan dan permukiman yang tersebar di daerah-daerah terpencil. Hal ini berdampak langsung terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perpajakan dan infrastruktur penunjang lainnya. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan untuk menjangkau kantor layanan Samsat atau mengakses informasi terkini tentang kewajiban pajaknya.

Selain tantangan geografis, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Utara menggantungkan hidup dari sektor informal seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro, yang cenderung memiliki penghasilan tidak tetap dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar serta kondisi alam. Ketidakstabilan penghasilan ini menyebabkan rendahnya prioritas terhadap pembayaran pajak kendaraan, terlebih jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar lainnya seperti pangan dan pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian target PAD dari sektor PKB.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi fiskal dan digital di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan, maupun cara-cara baru yang ditawarkan pemerintah dalam melakukan pembayaran, seperti sistem e-Samsat atau kanal digital lainnya. Rendahnya literasi ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada pelayanan manual dan keterbatasan dalam mengakses informasi keuangan secara daring, yang seharusnya menjadi media utama dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik.

Menyadari berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis dan terstruktur untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Pendekatan edukatif yang berbasis komunitas menjadi sangat relevan, di mana penyuluhan tentang pentingnya pajak, penggunaan teknologi layanan publik, serta akuntabilitas keuangan disampaikan secara langsung dan berkelanjutan melalui tokoh masyarakat, lembaga desa, dan media lokal. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk memperluas jangkauan layanan perpajakan ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara maksimal, misalnya melalui program Samsat keliling atau pelayanan jemput bola.

Dengan demikian, penerapan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan PKB tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan teknis semata, tetapi juga harus mencakup pendekatan yang menyentuh akar permasalahan sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan visi pembangunan daerah yang berkeadilan.

#### 4. Akuntabilitas dalam Pengelolaan PKB dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Masyarakat

Aspek Penilaian	Respons Masyarakat
Persepsi terhadap hasil pembangunan	Cenderung positif jika manfaat dirasakan langsung
Persepsi terhadap distribusi pajak	Negatif jika terjadi ketimpangan antarwilayah
Faktor yang memengaruhi kepercayaan	Infrastruktur, pelayanan publik, dan transparansi penggunaan pajak
Saran dari masyarakat	Pemerataan pembangunan, sosialisasi, dan laporan publik yang mudah diakses

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang sangat krusial dalam menilai efektivitas dan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Kepercayaan publik tidak semata-mata dibangun melalui kepatuhan pemerintah terhadap prosedur administratif atau ketentuan regulatif semata, melainkan lebih jauh ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap transparansi, integritas, dan manfaat nyata dari pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks Kabupaten Lombok Utara, persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pengalaman empiris mereka dalam merasakan hasil pembangunan yang secara langsung dibiayai dari penerimaan PKB, seperti infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas penerangan jalan umum, serta layanan publik lainnya.

Hasil wawancara dan analisis kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan kepuasan apabila pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar terasa secara nyata dan merata di berbagai wilayah, tidak hanya terfokus di pusat pemerintahan. Kepuasan tersebut berkontribusi positif terhadap tumbuhnya rasa percaya masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan mereka. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah keluhan yang muncul dari masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau pelosok, yang merasa belum sepenuhnya menikmati manfaat pembangunan secara proporsional. Ketimpangan distribusi pembangunan ini menimbulkan kesan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana dari sektor PKB, belum sepenuhnya dilakukan secara adil dan akuntabel.

Kurangnya intensitas sosialisasi dan keterbukaan informasi publik mengenai besaran penerimaan, alokasi, dan realisasi belanja dari sektor PKB turut memperkuat persepsi negatif di kalangan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fiskal menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan PKB berbasis akuntabilitas keuangan tidak hanya harus berfokus pada aspek teknis administrasi atau pencapaian target penerimaan, melainkan juga diarahkan untuk menjamin

transparansi hasil, pemerataan manfaat pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penting untuk disadari bahwa peningkatan penerimaan dari sektor pajak, meskipun menunjukkan keberhasilan dalam aspek fiskal, tidak serta-merta mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel apabila tidak disertai dengan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pemantauan dan evaluasi belanja harus dilakukan secara berkala dan terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan demikian, melalui pembahasan yang telah disusun dalam lima poin utama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendapatan PKB yang berbasis akuntabilitas keuangan sangat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Pembahasan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2024). The effect of algorithmic government, artificial intelligence, and tax service on tax compliance. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 604-612. <https://doi.org/10.29210/020244103>.
- Adikur, M. F., & Imran, A. F. (2022). Tax knowledge and service quality to motor vehicle taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 43-55. <https://doi.org/2303-0356>
- Ariyibi, K. O., Bello, O. F., Adediran, O. F., Phillips, A. P., Odumuwagun, O. O., & Kazeem, O. (2024). The application of blockchain technology to improve tax compliance and ensure transparency in global transactions. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(02), 1516–1527. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.13.2.2286>.
- Azmi, D. A. W. M., & Daud, S. A. M. (2024). Reconceptualizing tax compliance behavior: A theoretical matrix approach. *Accounting and Finance Research*, 13(1), 67-78. <https://doi.org/10.5430/afr.v13n1p67>.
- Casmadi, Y., & Widiyanti, R. N. (n.d.). *Efektivitas dan kontribusi pungutan pajak kendaraan bermotor dalam pendapatan asli daerah di P3DW Kabupaten Bogor periode 2017–2021*. D3 Akuntansi, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku kepatuhan pajak: Persepsi calon wajib pajak potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28373>.

- Erina, L., Martina, & Saptawan, A. (2024). Do happiness and corruption affect tax morale in Indonesia? An empirical analysis. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 99-111.
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24-34. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN>.
- Ficani, A., & Mekdessi, S. (2024). The impact of nudge on tax compliance: A study of taxpayers in Lebanon. *Arab Economic and Business Journal*, 16(2), Article 3. <https://doi.org/10.38039/2214-4625.1048>.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur. *Review: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.239>.
- Handayani, P. R., & Tambun, S. (n.d.). Pengaruh transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh etika profesi akuntan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25-38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>.
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sin, W. L. (2019). Taxpayer compliance model based on transparency, ethics, and trust. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 104-118. <https://www.jab.fe.uns.ac.id>
- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2021). Socialization, service, and knowledge matter with taxpayer compliance: An empirical study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89-95. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089>.
- Masita, N. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT Corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50-60. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60>.
- Mudjiyanti, R., Purnadi, , Wardani, S., & Kusbandiyah, A. (2022). Analysis of motor vehicle tax payment compliance at Samsat Banyumas Regency. *Journal of Accounting and Management*, 1(3), 45-56.
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2111844. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>.
- Pratiwi, R. A., & Heriyanto. (n.d.). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang*. Universitas Teknologi Digital Bandung.

- Ramadhan, M., Urip, T. P., & Purwadi, M. A. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), April.
- Rohmah, F. A., & Karsinah. (2024). Strategy for improving taxpayer compliance motorized vehicles: (Case study of SAMSAT Grobogan Regency). *Jurnal Ekonomi*, 13(2). <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>.
- Saragih, A. H., & Putra, I. D. N. S. (2024). Ethical perception of tax evasion in Indonesia: Determinants and consequences on voluntary tax compliance. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112-125.